



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMANUEL HINDIARTA ADI WIBAWA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI I
3. NHK : 134199

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.135.000.000**

1. Tanah Seluas 269 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 505 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah Seluas 472 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **364.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI IGNIS GX MT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 107.000.000
2. MOBIL, HONDA HR-V MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000



5. MOBIL, TOYOTA COROLLA DX Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	480.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	110.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.089.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.089.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.